

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu global yang sangat kompleks mencakup adanya penurunan kualitas ekosistem, meningkatnya degradasi alam, serta pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan terjadi karena adanya industrialisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Sampah merupakan salah satu isu permasalahan lingkungan yang mendesak.¹ Indonesia sebagai Negara yang memiliki pulau yang luas dan memiliki jumlah penduduk dalam jumlah besar juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan atas capaian kinerja pengelolaan sampah di Indonesia tahun 2024 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dihimpun dari 321 kabupaten/kota menunjukkan progres dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Total timbulan sampah tercatat mencapai 35,01 juta ton per tahun, dengan tingkat pengurangan baru sekitar 1,11% atau setara 390 ribu ton per tahun. Sementara itu, penanganan sampah berhasil dilakukan sebesar 37,66% atau 13,18 juta ton per tahun. Dari keseluruhan timbulan, 38,78%

¹ C. W. Purnomo, 2024, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Edisi Kedua), UGM Press, Yogyakarta, hlm. 15.

sampah berhasil dikelola, sedangkan 61,22% masih belum dikelola, yang setara dengan lebih dari 21,43 juta ton per tahun. Adapun kapasitas penanganan melalui TPA *Control/Sanitary* tercatat sekitar 8,55 juta ton per tahun, sementara yang masih ditangani dengan sistem TPA *Open Dumping* mencapai 6,77 juta ton per tahun, menunjukkan bahwa praktik pembuangan terbuka masih menjadi tantangan dalam sistem pengelolaan sampah nasional.² Pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius, dengan terjadinya pertumbuhan penduduk dan gaya hidup yang konsumtif semakin memperparah adanya timbunan sampah, terutama di wilayah perkotaan.

Permasalahan sampah yang menumpuk mengakibatkan terjadinya timbunan sampah akibat tidak dikelolanya sampah dengan baik berakibat pada terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara, serta meningkatkan resiko banjir akibat tersumbatnya saluran drainase.³ Permasalahan lain yang dihadapi terkait sampah juga berkaitan adanya praktik pembuangan sampah secara terbuka, dan adanya kegiatan pembakaran sampah yang masih dilakukan di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Hariyanto menunjukan bahwa regulasi pengelolaan sampah yang belum

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *TPA dalam Angka: Jejak Progres Pengelolaan Sampah Indonesia*, <https://data.pu.go.id/stories/tpa-dalam-angka-jejak-progres-pengelolaan-sampah-indonesia-0>, diakses 10 November 2025.

³ E. Damanhuri dan T. Padi, 2016, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung, hlm. 45.

Krisis lingkungan sangat berdampak luas bagi kesehatan manusia. Polusi, perubahan iklim, dan akumulasi limbah yang berlebihan di kawasan perkotaan merupakan sebab terjadinya krisis lingkungan. Bukan hanya kesehatan manusia akan tetapi, terjadinya krisis lingkungan akan berdampak bagi menurunnya kualitas ekosistem dan kesejahteraan sosial. Pengaruh pengelolaan sampah yang buruk melalui pembakaran berlebihan, dan sistem pembuangan yang tidak aman akan berdampak serius bagi lingkungan. Hal ini terjadi karena pengelolaan sampah yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas tanah, air, dan udara. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui upaya mitigasi melalui cara preventif yaitu sosialisasi, pembuatan pamflet larangan membuang sampah, serta penindakan tegas terhadap pelaku yang melanggar. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan cara menggabungkan teknologi, kebijakan, dan kesadaran perilaku masyarakat. Meskipun regulasi dan kebijakan telah dilakukan sebagai upaya pengelolaan sampah, hal ini belum dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang baik. Sebagian besar sisa sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir terbuka atau tempat pembuangan yang tidak memenuhi standar pengelolaan sampah.⁴ Hal demikian terjadi karena

⁴ KLH-BPLH, 2025, “KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, hlm. 1, <https://www.menlhk.go.id/>, diakses 10 November 2025.

rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik, dimulai dari memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, serta pemahaman akan dampak pencemaran apabila tidak mengelola sampah dengan baik. Disisi lain, minimnya fasilitas pengelolaan sampah untuk mendukung pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan sampah juga menjadi masalah pengelolaan sampah.

Secara konstitusional, dalam kerangka hukum Negara Indonesia telah mengatur dan memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional dan menjadi payung kebijakan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah secara khusus lebih mengatur akan kewajiban dalam pengurangan timbunan sampah termasuk didalamnya pemilahan sampah, penyelenggaraan tempat pembuangan sampah/tempat pembuangan akhir, dan partisipasi keterlibatan masyarakat serta pelaku usaha.⁵ Dengan demikian peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi kebijakan pengelolaan sampah nasional.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).

Sejalan dengan tantangan secara teknis dan sosial tersebut kebijakan nasional mendorong pengelolaan sampah dengan penerapan kebijakan terintegrasi dalam 3R (*Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan kembali), dan *Recycle* (Mendaur ulang) sebagai strategi utama. Penekanan tersebut diimplementasikan dengan penekanan pada pengurangan di hulu, pemanfaatan kembali sampah, dan daur ulang sebagai upaya mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan dampak lingkungan.⁶ Namun, penerapan 3R ini di lapangan juga perlu adanya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui dukungan infrastruktur pemilahan sampah, serta keterlibatan masyarakat sekitar dalam program pemberdayaan masyarakat. Realitas permasalahan lingkungan hidup menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyentuh aspek budaya, kesadaran manusia, dan moral masyarakat, maka pendekatan yang lebih menyeluruh berbasis nilai sangat dibutuhkan untuk ikut menyelesaikan permasalahan sampah ini salah satunya dapat ditemukan melalui perspektif keagamaan.

Persoalan mengenai permasalahan sampah tidak hanya bersifat teknis saja, melainkan juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Gereja Katolik menempatkan persoalan ekologi sebagai bagian dari tanggung

⁶ L. J. Lingga, 2024, "Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Peningkatan Kesadaran dan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Kajian Literatur)," *J-Innovative (Review)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 3.

jawab iman Katolik yang menekankan pentingnya martabat manusia dan ciptaan. Isu ekologi menjadi semakin kuat dengan terbitnya ensiklik *Laudato Si* oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 yang secara eksplisit menyoroti krisis ekologi global, keterkaitan antara alam ciptaan dan manusia, serta panggilan moral untuk merawat rumah bersama. *Ensiklik Laudato Si* menjadi rujukan bagi Gereja Katolik memberikan dasar orientasi secara teologis dan pastoral akan isu lingkungan hidup.⁷ *Laudato Si* sebagai dasar teologis, moral dan pastoral, Paus Fransiskus menggarisbawahi tiga hal penting. Secara teologis, seluruh ciptaan berasal dari Allah dan memiliki nilai intrinsik sehingga manusia dipanggil sebagai pelayan dan bukan sebagai perusak. Moral, krisis permasalahan ekologi tidak hanya sebatas masalah teknis namun juga sebagai masalah etis yang menuntut adanya perubahan gaya hidup, pola konsumtif, serta struktur ekonomi yang lebih adil.⁸ Pastoral, Gereja melihat bahwa Gereja Katolik perlu membimbing umat dalam berpartisipasi melalui pendidikan integral dengan membangun solidaritas sosial dan lingkungan serta mengembangkan nilai spiritualitas ekologi dalam liturgi dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.⁹

⁷ Paus Fransiskus, 2015, *Laudato Si': Terpujilah Engkau – Ensiklik tentang Merawat Rumah Kita Bersama* (Terj. Martin Harun, OFM), Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

⁸ M. Latif, 2017, "Ekoteologi dan Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1–14.

⁹ D. Naibaho, 2020, "Implementasi Ensiklik *Laudato Si'* dalam Pendidikan Lingkungan Hidup di Komunitas Katolik," *Jurnal Abdiel*, Vol. 4, No. 1, hlm. 45–56

Laudato Si memberikan dasar kerangka yang baik dan menyeluruh terkait teologi penciptaan, etika lingkungan, hingga nilai praktik pastoral yang dapat diterapkan dalam komunitas lokal. Dalam konteks nyata hal ini relevan untuk diimplementasikan di Paroki-Paroki yang ada di wilayah Dekanat Jambi, Keuskupan Agung Palembang. Berdasarkan data, Provinsi Jambi, terutama Kota Jambi, masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Tahun 2024 tercatat timbulan sampah sekitar 443 ton per hari, dengan 74% berhasil ditangani. Setiap rumah tangga menghasilkan rata-rata 1 kg sampah per hari.¹⁰ Ajaran *Laudato Si* menjadi sangat relevan di Gereja Paroki yang ada di Provinsi Jambi sebab Provinsi Jambi dalam menghadapi masalah lingkungan yang serius terkait pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Gereja Katolik di tingkat paroki dapat mengambil peranan strategis dengan cara memberikan edukasi bagi umat tentang pemilahan dan pengurangan sampah, pendirian dan pendampingan bank sampah berbasis komunitas, liturgi dan katekese yang menekankan akan semangat spiritualitas ekologis, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Paroki-paroki di dekanat Jambi bukan hanya sebagai pusat peribadatan saja,

¹⁰ Pemerintah Kota Jambi, “Komitmen Wujudkan Pengelolaan Sampah Tertutup, Pemkot Jambi Serahkan Bantuan Alat Penunjang Kebersihan,” <https://jambikota.go.id/berita/komitmen-wujudkan-pengelolaan-sampah-tertutup-pemkot-jambi-serahkan-bantuan-alat-penunjang-kebersihan>, diakses 10 November 2025.

melainkan juga sebagai pusat ekologi integral yang sejalan dengan semangat *Laudato Si*.

Penelitian ini memiliki urgensi yang baik dan penting karena persoalan sampah harus dipandang sebagai salah satu tantangan yang serius bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan benar dan terpadu akan menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, udara, dan air, bahkan dapat menyebabkan resiko bencana lingkungan yang besar seperti banjir. Provinsi Jambi sebagai bagian dari daerah lokal juga menghadapi permasalahan yang sama, terutama di wilayah perkotaan dengan adanya jumlah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Ensiklik *Laudato Si* sebagai semangat menjaga lingkungan merupakan aksi nyata pengelolaan sampah di tingkat komunitas religius, khususnya paroki.

Laudato Si memberikan pemahaman dan ajaran yang mendalam bahwa krisis ekologi bukan hanya masalah teknis semata melainkan juga krisis moral dan spiritualitas yang memerlukan adanya perubahan gaya hidup.¹¹ Pentingnya spriritualitas ekologis dalam usaha untuk membentuk kesadaran untuk merawat bumi sebagai rumah bersama.¹² Pemahaman ini mengajarkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai

¹¹ Paus Fransiskus, 2015, *Laudato Si': Ensiklik tentang Merawat Rumah Bersama*, Penerbit Obor, Jakarta.

¹² E. Sipayung, 2019, "Spiritualitas Ekologis dalam Terang *Laudato Si'*," *Melintas: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 35, No. 2, hlm. 130.

kewajiban secara administratif semata melainkan juga sebagai panggilan iman yang berimplikasi bahwa pengelolaan sampah berbasis iman dan pastoral dapat diimplementasikan di paroki-paroki sebagai bagian dari komunitas gereja. Permasalahan pengelolaan sampah yang muncul akibat rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan rendahnya rasa mencintai lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Melalui pendekatan berbasis iman dengan ajaran *Laudato Si*, menawarkan strategi baru untuk meningkatkan kesadaran secara religius dengan tindakan ekologis. Hal ini diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan partisipasi umat sekaligus memperkuat kelembagaan gereja untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan pengelolaan sampah di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan yang serius dapat dilihat dari aspek teknis, sosial, dan moral. Ajaran *Laudato Si* merupakan pendekatan integral yang mengkaitkan antara aspek spiritual, moral, praktis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan *Laudato Si* pada tingkat Paroki khususnya Dekanat Jambi belum banyak dikaji secara mendalam, dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis model pengelolaan sampah yang berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki Dekanat Jambi sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun rumusan masalah bagi penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengelolaan sampah di Gereja Paroki Dekanat Jambi saat ini telah mencerminkan nilai dan prinsip yang sejalan dengan ajaran *Laudato Si*?
2. Bagaimana model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si*?
3. Dapatkah model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengelolaan sampah di Gereja Paroki Dekanat Jambi telah mencerminkan nilai dan prinsip yang sejalan dengan ajaran *Laudato Si*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dapatkah model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, dengan lebih memperkaya kajian mengenai penerapan nilai dan prinsip *Laudato Si* dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas keagamaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Gereja Paroki Dekanat Jambi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara konkret mengenai strategi pengelolaan sampah yang sejalan dengan prinsip dan nilai *Laudato Si* sehingga mampu menjadi contoh nyata dalam mewujudkan Gereja yang ramah lingkungan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penguatan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah, khususnya sebagai rujukan awal dalam perumusan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, serta memperkuat arah kebijakan daerah yang menempatkan partisipasi masyarakat dan komunitas keagamaan sebagai bagian dari solusi pengelolaan lingkungan.

c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan pentingnya kerjasama dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, khususnya melalui kolaborasi dengan institusi keagamaan.

d. Bagi umat dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat katolik serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah, sehingga mampu mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Model Pengelolaan Sampah Berbasis Laudato Si di Gereja Paroki Dekanat Jambi sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi**” merupakan karya asli penulis dan tidak merupakan hasil dari plagiasi tesis yang telah ditulis sebelumnya. Sebagai pembanding, berikut disajikan beberapa judul tesis yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini :

1. Frendy Victor, NIM : 175202705. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020, dengan judul Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm Nusantara Terhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (Kja) yang Berlebihan.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan?
- 2) Mengapa terjadi pencemaran danau Toba yang dilakukan oleh PT. Aquafarm akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan?

b. Hasil penelitian :

- 1) PT. AquaFarm Nusantara belum melakukan tindakan pemulihan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku didalam Pasal 54 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pemantauan dan pengukuran parameter kualitas air di Danau Toba, tidak menggunakan racun dan obat-obatan yang dilarang, pemberian pakan sesuai dengan standar kebutuhan.
- 2) Pemerintah Daerah Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur menegaskan bahwa daya tampung beban pencemaran budidaya perikanan adalah 10.000, ditemukan bahwa PT. Aquafarm Nusantara memproduksi sebesar 32.254,32 ton ikan dan hal tersebut melebihi tiga kali lipat batas daya tampung beban pencemaran air danau toba.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Frendy Victor berfokus pada tanggung jawab hukum korporasi dalam pemulihan lingkungan akibat pencemaran Danau Toba oleh PT. Aquafarm Nusantara, dengan pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Berbeda dengan itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perumusan model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki Dekanat Jambi sebagai upaya preventif dan partisipatif dalam mendukung pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

d. Persamaan Penelitian

Penelitian penulis, memiliki persamaan dengan penelitian Frendy Victor, yaitu sama-sama mengkaji pemulihan lingkungan hidup dalam perspektif hukum lingkungan dengan merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Enis Tristiana. NIM : 166010100111014. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dengan judul Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik.

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastik selama ini?

2) Bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastik melalui analisis pasal 15 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?

b. Hasil penelitian :

1) Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastic selama ini masih sedikit, terlihat dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah hanya terdapat (2) pasal yang mengatur mengenai kebijakan EPR dan dalam Peraturan Pemerintah hanya kewajiban produsen yang diatur dalam pasal 12-15. Padahal pengaturan EPR membutuhkan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sampah.

2) Penerapan EPR di Indonesia harus didukung melalui peraturan hukum yang lebih komprehensif Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastic melalui analisis Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menunjukan bahwa pengaturan EPR dalam Pasal 15 masih memiliki kekurangan seperti norma hukum yang belum diatur terkait EPR.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian oleh Enis Triana berfokus pada pengaturan hukum *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam pengelolaan

sampah plastik, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* oleh komunitas keagamaan sebagai pendekatan partisipasi dalam pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

d. Persamaan Penelitian

Penelitian penulis, memiliki persamaan dengan penelitian Enis Tristiana, yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan, serta menganalisis pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Sampah.

3. Carlito da Costa, NIM : 16.28.2039. Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan judul Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan?
- 2) Apakah sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan?
- 3) Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan solusi yang

ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

b. Hasil penelitian

- 1) Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya kota yang berkelanjutan karena manusia dengan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi sebab manusia dan selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum berjalan baik dan optimal dilihat dari wawasan lingkungan dikarenakan faktor penanganan sampah yang kurang memadai menyebabkan terjadinya penumpukan sampah.
- 3) Faktor yang menjadi penghambat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yaitu faktor jumlah penduduk, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan program pelatihan terkait pengelolaan sampah dan mengadakan pelatihan bagi pengembangan SDM.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Carlito da Costa berfokus pada sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dalam konteks kebijakan perkotaan untuk mewujudkan kota berkelanjutan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* yang diterapkan oleh Gereja sebagai komunitas keagamaan dalam mendukung pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

d. Persamaan Penelitian

Penelitian penulis, memiliki persamaan dengan penelitian Carlito da Costa, yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan, dan praktik pengelolaan sampah ditingkat lokal sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Lely Khairani HSB, NPM : 71210123148, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dengan judul Peranan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Memberikan Hak Lingkungan Hidup yang Sehat Bagi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat?

- 2) Bagaimana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan?
- 3) Bagaimana hambatan dan solusi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan?

b. Hasil penelitian :

- 1) Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari sampah, ialah melalui mewujudkan penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, dan melestarikan fungsi dan memulihkan kemampuan sumber daya alam serta pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai payung hukum adalah melalui Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No 14 Tahun 2020 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengelolaan sampah melalui merumuskan program upaya pengurangan sampah, membangun bank sampah, dan sarana pendukungnya dengan berupaya menyediakan peralatan, dan melakukan sosialisasi.

3) Hambatan dan solusi penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan ialah minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah, minim lahan tempat pembuangan akhir (TPA). Solusi yang dilakukan ialah dengan melaksanakan kegiatan pembentukan dan pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat pengelolaan sampah.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Lely Khairani berfokus pada peran dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui instrument pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* yang digerakkan oleh komunitas keagamaan sebagai pendekatan partisipatif dalam pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

d. Persamaan penelitian

Penelitian penulis, memiliki persamaan dengan penelitian Lely Khairani, yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan dengan menekankan peran aktor kelembagaan dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

5. Wira Anggara. NIM : B012221018. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah politik hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia memberikan dampak yang baik untuk intergenerasi?
- 2) Apakah sanksi hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah rumah tangga telah optimal?

b. Hasil penelitian :

- 1) Pengelolaan sampah di Indonesia secara regulasi dari undang-undang hingga peraturan daerah diterapkan secara pengelolaan namun masih terdapat celah dari segi pengawasan dan pengambilan sampah.
- 2) Diperlukan perubahan atas undang-undang terkait pengelolaan sampah terutama pada Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Wira Anggara berfokus pada politik hukum dan efektivitas regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada

perumusan model pengelolaan sampah berbasis *Laudato Si* yang dijalankan oleh komunitas keagamaan sebagai pendekatan nilai dan partisipatif dalam mendukung pemulihan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

d. Persamaan Penelitian

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian Wira Anggara, yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan sampah rumah tangga dalam perspektif hukum lingkungan, dengan melihat kebijakan dan peraturan hukum tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan tesis yang telah dibuat sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Dari segi persamaan, seluruh penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dalam menyoroti upaya pengelolaan sampah dan pemulihan lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap lingkungan. Setiap penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara peraturan perundang-undangan dan implementasi di lapangan baik melalui peran pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Selain itu, kelima tesis tersebut dan penelitian penulis sama-sama menempatkan pengelolaan sampah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan yang

bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari judul tesis penulis yang berjudul “Model Pengelolaan Sampah Berbasis *Laudato Si* di Gereja Paroki Dekanat Jambi sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi” terletak pada lokasi dan konteks penelitian. Di beberapa tesis sebelumnya menyoroti wilayah yang berbeda di Indonesia dan memiliki fokus yang beragam, seperti pencemaran Danau Toba oleh PT. Aquafarm Nusantara yang diteliti oleh Frendy Victor, Pengaturan *Extended Producer Responsibility (EPR)* Terhadap Sampah Plastik yang diteliti Oleh Enis Tristiana, Sistem Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kota Semarang yang diteliti oleh Carlito da Costa, Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan yang diteliti oleh Lely Khairani, serta Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang diteliti oleh Wira Anggara. Sementara itu penelitian penulis berlokasi di Gereja Paroki Dekanat Jambi yang berfokus pada komunitas keagamaan sebagai subjek hukum lingkungan yang memberikan sudut pandang baru dan unik dalam melihat keterlibatan komunitas keagamaan dalam pemulihan lingkungan hidup.

Dari segi subjek penelitian, kelima tesis terdahulu berfokus pada pemerintah, korporasi, maupun masyarakat umum sebagai aktor utama

dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam penelitian tesis ini, penulis menjadikan Gereja Katolik dan umat beriman sebagai pelaku utama yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan moral sebagaimana diajarkan dalam Ensiklik *Laudato Si*. Pendekatan ini memperkaya perspektif hukum lingkungan karena menampilkan sinergi antara norma hukum positif dengan norma moral religius dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, judul tesis penulis memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dalam pengembangan studi hukum lingkungan melalui integrasi antara hukum positif dan ajaran Gereja Katolik. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peranan lembaga keagamaan dalam pemulihan lingkungan hidup serta mempertegas bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara atau korporasi, melainkan juga panggilan moral umat beriman untuk merawat bumi sebagai rumah bersama.